



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

LPSE Minta OPD Usulkan Blacklist

Kalau Proyek Tidak Selesai

PELABAI - Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Sekretariat Kabupaten Lebong, Hery Setiawan, ST meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar benar mengawasi pekerjaan fisik proyek yang telah selesai lelang. Jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan rencana atau pekerjaan tidak selesai 100 persen, diingatkannya OPD mengusulkan rekanan pelaksanaannya diblacklist (masuk daftar hitam).

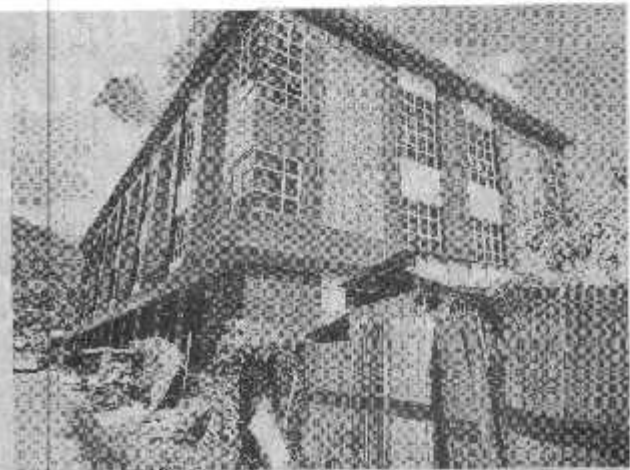
Dipastikannya setiap usulan blacklist dari OPD akan ditinjau/juri oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lebong. "Ini sesuai Peraturan LKLP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, red) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," kata Hery.

Jika seluruh persyaratan blacklist sudah terpenuhi,

LPSE akan menyangkan identitas perusahaan dan kontraktor yang melaksanakan kegiatan dalam daftar hitam laman LPSE. "Teknisnya melalui pengajuan PPK (pejabat pembuat komitmen, red) yang selanjutnya diverifikasi oleh APIP (aparatus pengawas internal pemerintah, red) serta tahap lain yang diatur dalam peraturan LKPP," terang Hery.

Pentingnya blacklist bagi perusahaan dan kontraktor yang bermasalah dalam pengerjaan proyek di Lebong, versi Hery, agar kejadian serupa tidak terulang. Baik terhadap pekerjaan fisik Pemkab Lebong itu sendiri maupun daerah lain. "Yang pasti kalau tidak diblacklist, tidak memberi pelajaran serta efek jera kepada para perusahaan dan kontraktor," ungkap Hery.

Terpisah, Bupati Lebong, Kopli Ansori mengingatkan seluruh rekanan pelaksana kegiatan fisik yang bersumber dari APBN maupun APBD provinsi dan APBD kabupaten berkomitmen



DIKEBUT: Tahun ini PTM Muara Aman ini ditarget sudah terpasang plafon di 4 lantainya.

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Khusus kegiatan yang dibiayai anggaran kabupaten, jika pelaksanaannya terlambat, dipastikannya tidak akan digandang lagi. "Termasuk hasil kerjanya harus bagus sesuai perencanaan," tegas Bupati.

Jika pekerjaan tidak selesai, OPD penerima barang wajib mengusulkan sanksi blacklist terhadap rekanan pelaksana. Sanksi blacklist

terhadap pihak ketiga yang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan merupakan bentuk keseriusan Pemkab Lebong mewujudkan Kabupaten Lebong yang mandiri dan terdepan. "Kalau OPD tidak mengusulkan blacklist, artinya OPD bersangkutan tidak mendukung program pembangunan yang dicanangkan Pemkab Lebong," demikian Bupati. (sca)